

MANAJEMEN MUTU MELALUI STRATEGI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN: ANALISIS PADA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Syamsul Bahri¹, Nuri Aslami²

^{1,2}) Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
e-mail: syamsulbahri040700@gmail.com¹, nuriaslami@uinsu.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi penerapan strategi penjaminan mutu pendidikan oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Utara melalui pendekatan manajemen mutu. Fokus utama penelitian adalah strategi IMPRESIF yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di provinsi ini melalui kerjasama lintas sektoral, advokasi kebijakan, serta optimalisasi sumber daya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan analisis studi kasus dengan data primer yang diperoleh dari laporan resmi BPMP Provinsi Sumatera Utara, kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta data yang terverifikasi dari berbagai sumber daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi IMPRESIF berhasil mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui program-program seperti Sekolah Penggerak, Kurikulum Merdeka, dan digitalisasi pendidikan. Strategi ini juga efektif dalam mengatasi tantangan utama pendidikan di Sumatera Utara, seperti rendahnya kompetensi literasi dan numerasi, ketimpangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta keterbatasan akses pendidikan di daerah terpencil. Meskipun demikian, peningkatan tata kelola dan infrastruktur pendidikan masih diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih merata di seluruh wilayah.

Kata kunci: Manajemen Mutu, Penjaminan Mutu Pendidikan, BPMP Sumatera Utara, IMPRESIF

Abstract

This study evaluates the implementation of education quality assurance strategies by the North Sumatra Province Education Quality Assurance Center (BPMP) through a quality management approach. The main focus of the research is the IMPRESIF strategy which aims to improve the quality of education in the province through cross-sectoral cooperation, policy advocacy and resource optimization. This research uses descriptive qualitative methods and case study analysis with primary data obtained from official reports of the BPMP of North Sumatra Province, policies of the Ministry of Education, Culture, Research and Technology, and verified data from various online sources. The results show that the IMPRESIF strategy has successfully driven improvements in the quality of education through programs such as Sekolah Penggerak, Kurikulum Merdeka, and education digitalization. The strategy is also effective in addressing key education challenges in North Sumatra, such as low literacy and numeracy competencies, education inequality between urban and rural areas, and limited access to education in remote areas. Nonetheless, improvements in education governance and infrastructure are still needed to achieve more equitable outcomes across the region.

Keywords: Quality Management, Education Quality Assurance, BPMP North Sumatra, IMPRESIF

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran sentral dalam membangun sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing di era globalisasi. Di Indonesia, peningkatan kualitas pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah untuk menciptakan generasi yang cerdas, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Mutu pendidikan yang tinggi tidak hanya berpengaruh pada pengembangan individu, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendorong kemajuan sosial dan ekonomi nasional.

Sebagai upaya menjamin mutu pendidikan yang berkelanjutan, pemerintah telah menetapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. SNP mencakup delapan komponen utama, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Komponen-komponen ini dirancang untuk memastikan pendidikan berkualitas dan merata di seluruh Indonesia.

Namun, implementasi SNP di lapangan menghadapi berbagai kendala, terutama di daerah dengan keterbatasan infrastruktur dan sumber daya pendidikan. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) bertanggung jawab untuk memastikan penerapan SNP secara efektif di setiap daerah, termasuk di

Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022, BPMP Provinsi Sumatera Utara memiliki tugas utama untuk melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di provinsi ini. Dalam pelaksanaannya, BPMP menyelenggarakan fungsi seperti pemetaan mutu pendidikan, pengembangan model penjaminan, supervisi, fasilitasi peningkatan mutu, kemitraan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu, termasuk urusan administrasi (BPMP Provinsi Sumatera Utara, 2024).

Berdasarkan data dari Laporan Kinerja BPMP Sumatera Utara Tahun 2023, belum ada sekolah di Sumatera Utara yang mencapai kategori SNP penuh, meskipun ada peningkatan dalam capaian delapan SNP. Kompetensi literasi dan numerasi siswa masih rendah, ditunjukkan oleh hasil UN dan AKSI yang kurang memuaskan, terutama dalam Bahasa Indonesia dan Matematika. Tingginya angka perundungan menandakan perlunya penguatan karakter siswa. Tata kelola LPMP juga memerlukan perbaikan untuk mencapai predikat ZI-WBK. Sebagian penduduk masih buta huruf, dan ada yang belum pernah bersekolah, menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya merata. Ketimpangan antara pendidikan di perkotaan dan pedesaan juga menjadi tantangan, dengan keterbatasan infrastruktur di daerah pedesaan.

Penelitian sebelumnya tentang penjaminan mutu pendidikan di Indonesia cenderung berfokus pada aspek teknis di tingkat nasional, seperti kurikulum atau standar kompetensi lulusan, tanpa memberikan perhatian yang memadai pada tantangan implementasi di tingkat daerah dengan keterbatasan sumber daya. Sebagai contoh, penelitian (Elwijaya et al., 2021) hanya mengevaluasi kebijakan pendidikan dari perspektif makro, sementara (Suwandi & Permatasari, 2021) lebih menitikberatkan pada kurikulum dan kompetensi guru, tanpa mengkaji secara mendalam strategi manajemen mutu di tingkat provinsi atau lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan menganalisis strategi penjaminan mutu pendidikan yang diterapkan oleh BPMP Sumatera Utara. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana strategi penjaminan mutu tersebut beradaptasi dengan kondisi lokal, serta bagaimana BPMP mengatasi tantangan disparitas antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami efektivitas program dan kebijakan BPMP di tingkat provinsi, serta menawarkan rekomendasi yang relevan untuk peningkatan mutu pendidikan di daerah yang menghadapi kesenjangan akses dan kualitas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami dan mengevaluasi pelaksanaan strategi penjaminan mutu pendidikan oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Pendekatan ini dipilih karena memberikan pemahaman mendalam tentang proses dan dinamika penerapan strategi penjaminan mutu pendidikan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus yang berfokus pada penerapan strategi penjaminan mutu pendidikan oleh BPMP Sumatera Utara melalui pendekatan manajemen mutu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara rinci strategi-strategi yang diterapkan dalam konteks lembaga tersebut.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber primer yang meliputi dokumen dan laporan resmi yang diterbitkan oleh BPMP Provinsi Sumatera Utara serta lembaga terkait lainnya. Pemilihan sumber data primer ini dilakukan untuk menjamin keakuratan dan relevansi informasi yang dikumpulkan. Adapun data primer dalam penelitian ini mencakup:

- a. Laporan resmi BPMP Provinsi Sumatera Utara mengenai Program Penjaminan Mutu Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara, serta Laporan Kinerja BPMP Sumatera Utara.
- b. Dokumen kebijakan, termasuk Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang tugas pokok BPMP.
- c. Data yang diambil dari berbagai sumber daring terverifikasi terkait kualitas pendidikan di Sumatera Utara.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen terhadap berbagai dokumen dan laporan resmi yang diterbitkan oleh BPMP Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta data yang terverifikasi dari berbagai sumber daring. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data otentik yang mencerminkan pelaksanaan strategi penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Utara.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari dokumen primer dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis). Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang relevan dengan pelaksanaan strategi penjaminan mutu pendidikan di BPMP Provinsi Sumatera Utara. Proses analisis data meliputi:

- a. Reduksi Data: Menyaring informasi dari dokumen dan laporan yang berhubungan langsung dengan kebijakan dan program penjaminan mutu.
- b. Kategorisasi Data: Data dikategorikan berdasarkan tema-tema utama seperti tantangan, strategi, dan dampak program penjaminan mutu pendidikan.
- c. Penarikan Kesimpulan: Kesimpulan ditarik berdasarkan pola dan tema yang diidentifikasi selama proses analisis untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang efektivitas strategi yang diterapkan.

5. Validitas Data

Untuk memastikan keandalan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai dokumen primer seperti laporan resmi BPMP Provinsi Sumatera Utara, dokumen kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta data yang terverifikasi dari berbagai sumber daring. Teknik ini memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat diandalkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

a. Tantangan Penjaminan Mutu Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara

1. Belum Ada Satuan Pendidikan dengan Kategori SNP
Meskipun terdapat peningkatan dalam capaian delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di satuan pendidikan pada periode 2015-2019, tidak ada sekolah di Sumatera Utara yang mencapai kategori SNP penuh. Rata-rata pencapaian SNP masih berada pada tingkat menuju SNP level 4. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penjaminan mutu pendidikan masih belum optimal dan perlu ditingkatkan lebih lanjut.
2. Kompetensi Literasi dan Numerasi Siswa yang Rendah
Kompetensi siswa dalam literasi dan numerasi di Provinsi Sumatera Utara masih perlu ditingkatkan. Data dari Ujian Nasional dan Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) menunjukkan nilai yang rendah, terutama dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika. Hal ini mencerminkan bahwa banyak siswa yang belum mencapai kompetensi dasar yang diperlukan.
3. Penguatan Karakter Siswa yang Masih Lemah
Tingginya angka perundungan (bullying) di sekolah-sekolah Sumatera Utara menunjukkan bahwa penguatan karakter siswa masih perlu ditingkatkan. Dalam survei tahun 2018, 41,1% siswa di Indonesia mengalami perundungan, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat perundungan tertinggi di dunia. Hal ini menandakan perlunya upaya lebih dalam menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung penguatan karakter siswa.
4. Kualitas Tata Kelola dan Pelayanan Organisasi yang Perlu Ditingkatkan
Tata kelola internal LPMP Sumatera Utara masih memerlukan perbaikan, terutama dalam hal integrasi layanan dan pengawasan. Untuk mencapai predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) pada tahun 2021, LPMP perlu melakukan inovasi dalam pelayanan dan meningkatkan kualitas tata kelola organisasi (LPMP Sumatera Utara, 2020).
5. Buta Huruf
Meskipun terjadi peningkatan dalam rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, masih ada sekitar 0,93 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas di Sumatera Utara yang buta huruf pada tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian penduduk yang memiliki kualitas pendidikan rendah.
6. Penduduk Tidak/Belum Pernah Sekolah

Sebanyak 1,52 persen penduduk berumur 10 tahun ke atas belum pernah bersekolah. Ini berarti 2 dari setiap 100 orang di Sumatera Utara tidak pernah merasakan bangku sekolah, menandakan bahwa pembangunan pendidikan belum dirasakan oleh semua kalangan masyarakat.

7. Ketimpangan Pendidikan Perkotaan dan Pedesaan

Mayoritas penduduk yang tidak pernah bersekolah atau buta huruf berada di daerah pedesaan. Selain itu, penduduk di pedesaan sebagian besar hanya menamatkan pendidikan hingga Sekolah Dasar (SD), sementara di perkotaan mayoritas menamatkan pendidikan hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Ketimpangan ini memperlihatkan adanya jurang kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

8. Keterbatasan Akses dan Infrastruktur Pendidikan di Pedesaan

Penduduk di pedesaan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengakses pendidikan karena keterbatasan infrastruktur dan fasilitas sekolah yang memadai (Sebayang, 2019).

b. IMPRESIF Strategi Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Sumatera Utara

Strategi IMPRESIF merupakan akronim yang mencakup beberapa elemen utama dalam strategi penjaminan mutu pendidikan yang dijalankan oleh BPMP Sumatera Utara (BPMP Provinsi Sumatera Utara, 2023). Strategi ini tidak hanya berfokus pada peningkatan mutu sekolah secara teknis, tetapi juga mendorong perubahan budaya kerja dan kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan pendidikan. Berikut adalah komponen dalam strategi IMPRESIF (Lubis, 2023):

1. **I** (Internalisasi): Pembudayaan kebijakan pendidikan di lingkungan internal BPMP serta di satuan pendidikan. Tujuannya adalah menjadikan kebijakan pendidikan bagian dari keseharian dan budaya organisasi.
2. **M** (Melakukan Advokasi): Memberikan advokasi atas kebijakan dan program pendidikan kepada pemangku kepentingan, seperti dinas pendidikan dan pemerintah daerah, agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan tepat di lapangan.
3. **P** (Pelibatan Sumber Daya): Mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki BPMP, baik SDM, anggaran, maupun jaringan dengan pemangku kepentingan lainnya, untuk mendukung upaya peningkatan mutu pendidikan.
4. **R** (Roadshow): Mengadakan kunjungan langsung ke berbagai kabupaten/kota untuk mensosialisasikan kebijakan dan memastikan komitmen dari pemerintah daerah serta sekolah-sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan.
5. **E** (Elaborasi Tugas Bersama): Menjalin kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Ini termasuk membangun kemitraan dalam mengembangkan pendidikan yang bermutu di daerah.
6. **S** (Secangkir Kopi Berbuah Inspirasi): Memanfaatkan komunikasi formal dan informal, baik melalui diskusi ringan maupun pertemuan resmi, untuk mendapatkan masukan dan inovasi yang mendukung peningkatan mutu pendidikan.
7. **I** (Intervensi Kebijakan): Melakukan intervensi langsung pada kebijakan pendidikan di tingkat daerah untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang ada mendukung peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan.
8. **F** (Fokus pada Tujuan Implementasi Kebijakan): Mengarahkan semua tindakan dan sumber daya menuju pencapaian tujuan kebijakan pendidikan yang sudah ditetapkan, seperti pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan pelaksanaan program Merdeka Belajar.

Tujuan dari strategi ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Utara melalui kerjasama lintas sektoral, advokasi kebijakan, dan optimalisasi sumber daya, sehingga dapat mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pendidikan di provinsi ini. Fungsi dari strategi IMPRESIF adalah sebagai panduan operasional bagi BPMP Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penjamin mutu pendidikan. Pendekatan yang diambil oleh strategi IMPRESIF meliputi (Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2023):

- a. Advokasi Konsultatif: BPMP tidak hanya memberi instruksi, tetapi juga mendengarkan masukan dari sekolah dan pemerintah daerah untuk menciptakan solusi yang sesuai dengan konteks lokal.
- b. Optimalisasi Sumber Daya: Setiap sumber daya yang dimiliki oleh BPMP dan pemangku kepentingan lokal dioptimalkan untuk mendukung program penjaminan mutu pendidikan.
- c. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan: Melibatkan dinas pendidikan kabupaten/kota dan berbagai pihak lainnya dalam pelaksanaan kebijakan dan program pendidikan.

Strategi IMPRESIF diterapkan di semua jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga pendidikan menengah di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara. Strategi ini juga mencakup pengawasan dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat daerah.

c. Program Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Sumatera Utara

1. Implementasi Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka diterapkan sebagai bagian dari pemulihan pembelajaran pasca-pandemi, dengan sekolah diberi kebebasan memilih tiga tipe penerapan (Mandiri Belajar, Mandiri Berubah, dan Mandiri Berbagi). Dampaknya, sebanyak 6.150 sekolah di Sumatera Utara telah mendaftarkan diri, dan sekitar 82% sekolah menyelesaikan topik pembelajaran melalui PMM (Platform Merdeka Mengajar).

2. Program Sekolah Penggerak (PSP)

Bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa secara holistik melalui peningkatan kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta pengembangan sumber daya manusia unggul. Dampaknya, sebanyak 748 sekolah terpilih mengikuti PSP, dengan intervensi yang meliputi penguatan SDM dan digitalisasi sekolah.

3. Perencanaan Berbasis Data (PBD)

Program ini membantu menyusun anggaran pendidikan berdasarkan data rapor pendidikan untuk mengarahkan anggaran dan program ke area yang paling membutuhkan. Dampaknya, banyak kabupaten/kota menggunakan PBD untuk menyusun APBD dan RKAS yang lebih tepat sasaran.

4. Digitalisasi Pendidikan

Melalui pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan aktivasi akun belajar.id, digitalisasi ini meningkatkan akses sumber daya pembelajaran bagi guru dan siswa. Dampaknya, sebanyak 1.438.728 akun belajar telah diaktifkan di Sumatera Utara, dan digitalisasi ini membantu meningkatkan kualitas pembelajaran.

5. Pokja Manajemen Operasional (PMO) Daerah

PMO berperan dalam merencanakan, melaksanakan, dan memonitor program prioritas pendidikan, seperti Kurikulum Merdeka, melalui rapat koordinasi rutin. Dampaknya, PMO membantu menyelesaikan kendala implementasi program pendidikan di sekolah melalui koordinasi yang baik antar pihak.

6. Penguatan Tata Kelola dan SAKIP

BPMP berfokus pada peningkatan tata kelola melalui penilaian SAKIP untuk memastikan manajemen anggaran yang efektif dan transparan. Dampaknya, BPMP Sumatera Utara berhasil meraih predikat A dalam penilaian SAKIP, menunjukkan efektivitas dalam tata kelola organisasi dan penggunaan anggaran (Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2024).

d. Manajemen Mutu dalam Pendidikan

Manajemen mutu dalam pendidikan bertujuan untuk secara aktif mengelola kualitas agar sesuai dengan harapan masyarakat. Manajemen mutu adalah bagian dari manajemen yang tidak hanya memastikan kualitas, tetapi juga berusaha untuk meningkatkannya. Ini dicapai melalui penerapan kebijakan mutu yang terintegrasi dan pemantauan kualitas secara berkelanjutan (Mundiri, 2019). Sistem manajemen mutu adalah struktur dan prosedur yang mengatur proses serta sumber daya yang dibutuhkan untuk memastikan standar mutu tercapai. Sistem ini tidak terpisahkan dari norma dan standar internasional yang mengatur kualitas.

Sekolah yang diberi otonomi memiliki kesempatan untuk mengelola pendidikan secara mandiri guna mencapai tujuan pendidikan. Otonomi pendidikan berarti memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengatur proses pendidikan, namun tetap berada dalam kerangka peraturan nasional yang bertujuan memperkuat pendidikan lokal agar menghasilkan masyarakat yang bersatu melalui keberagaman (Arwildayanto et al., 2018). Pemerintah menerapkan otonomi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sekolah diharapkan dapat tumbuh mandiri dengan kemandirian yang didukung oleh kemampuan memimpin, berkolaborasi, dan mengambil keputusan yang bijaksana.

Faktor-faktor yang mendorong penerapan otonomi pendidikan antara lain: tuntutan masyarakat untuk menilai kualitas sekolah, kurangnya efektivitas sistem pendidikan yang terpusat, dan kebutuhan sekolah untuk merespons perubahan dengan cepat. Kinerja sekolah yang dinilai tidak memadai serta meningkatnya persaingan dalam mendapatkan sumber daya juga mendorong desentralisasi pendidikan (Arbangi et al., 2022). Pengendalian mutu adalah langkah untuk

memastikan produk atau layanan yang dihasilkan oleh organisasi terus meningkat dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Program ini memastikan komitmen terhadap kualitas dan efisiensi biaya melalui pengendalian kualitas yang baik (Baharun & Zamroni, 2019).

Menurut Susanto (2018), ada tiga jenis pengendalian dalam manajemen: (a) Feedforward control atau pengendalian sebelum pekerjaan dimulai; (b) Concurrent control atau pengendalian selama pekerjaan berlangsung; dan (c) Feedback control atau pengendalian setelah pekerjaan selesai. Pengendalian mutu di sekolah mencakup pemantauan di berbagai aspek, seperti kegiatan di kelas, bimbingan konseling, kurikulum, perpustakaan, penggunaan anggaran, pengembangan sistem informasi pendidikan, pengelolaan personel, sarana prasarana, hubungan eksternal, serta layanan bagi siswa dan lulusan.

Pembahasan

1. Implementasi Manajemen Mutu dalam Strategi Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Sumatera Utara

Strategi penjaminan mutu pendidikan yang diterapkan oleh BPMP Provinsi Sumatera Utara melalui pendekatan IMPRESIF memiliki peran penting dalam mengatasi berbagai tantangan penjaminan mutu pendidikan di daerah Sumatera Utara. Berikut adalah analisis tentang bagaimana konsep manajemen mutu diimplementasikan dalam strategi penjaminan mutu pendidikan:

a. Tantangan: Belum Ada Satuan Pendidikan dengan Kategori SNP

Manajemen Mutu: Manajemen mutu mengacu pada pengelolaan sistem pendidikan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa satuan pendidikan secara berkelanjutan bekerja menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sistem ini memastikan pemantauan kualitas yang konsisten dan evaluasi berkelanjutan untuk mendeteksi kekurangan dan memberikan solusi tepat.

Strategi IMPRESIF: Komponen Internalisasi dan Fokus pada Tujuan Implementasi Kebijakan memastikan bahwa kebijakan SNP menjadi bagian dari budaya sekolah, mendorong sekolah-sekolah untuk meningkatkan standar mereka hingga mencapai SNP. Dengan advokasi konsultatif dan intervensi kebijakan, BPMP memberikan arahan dan dukungan langsung kepada sekolah-sekolah yang belum memenuhi SNP, memperkuat komitmen mereka untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan.

b. Tantangan: Rendahnya Kompetensi Literasi dan Numerasi Siswa

Manajemen Mutu: Manajemen mutu dalam pendidikan bertujuan meningkatkan kompetensi dasar siswa melalui evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran. Pengendalian mutu yang melibatkan feedforward, concurrent, dan feedback control membantu memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan sesuai dengan standar yang diharapkan.

Strategi IMPRESIF: Dengan Pelibatan Sumber Daya dan Elaborasi Tugas Bersama, BPMP memastikan bahwa sekolah memiliki dukungan sumber daya dan kolaborasi dengan dinas pendidikan serta pihak terkait untuk meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi. Program Sekolah Penggerak dan Kurikulum Merdeka mendukung sekolah dengan alat dan pendekatan modern untuk memperbaiki hasil belajar siswa melalui Platform Merdeka Mengajar.

c. Tantangan: Penguatan Karakter Siswa yang Masih Lemah

Manajemen Mutu: Pengelolaan mutu juga mencakup penguatan karakter siswa melalui proses pendidikan yang efektif. Evaluasi karakter siswa dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai-nilai moral dan etika yang diharapkan ditanamkan dalam kurikulum dan aktivitas sekolah.

Strategi IMPRESIF: Melalui komponen Secangkir Kopi Berbuah Inspirasi dan Roadshow, BPMP menciptakan lingkungan yang mendukung dialog dan interaksi positif antar pemangku kepentingan untuk merancang pendekatan penguatan karakter yang lebih efektif. Program Sekolah Penggerak juga mendorong pengembangan karakter siswa melalui kegiatan yang berfokus pada profil pelajar Pancasila, dengan memadukan literasi, numerasi, dan pembentukan karakter.

d. Tantangan: Kualitas Tata Kelola dan Pelayanan Organisasi yang Perlu Ditingkatkan

Manajemen Mutu: Manajemen mutu menekankan pada efisiensi dan transparansi dalam tata kelola organisasi. Ini melibatkan pengendalian proses secara menyeluruh untuk memastikan bahwa pelayanan organisasi berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Strategi IMPRESIF: Komponen Fokus pada Tujuan Implementasi Kebijakan dan Intervensi Kebijakan mendorong BPMP Sumatera Utara untuk melakukan peningkatan tata kelola dengan memfokuskan sumber daya pada perbaikan pelayanan dan peningkatan kinerja organisasi.

Melalui penguatan tata kelola dan evaluasi SAKIP, BPMP dapat menjaga transparansi dan penggunaan anggaran yang efektif.

- e. Tantangan: Buta Huruf dan Penduduk yang Tidak/Belum Pernah Sekolah
Manajemen Mutu: Manajemen mutu memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang merata terhadap pendidikan, termasuk upaya pengentasan buta huruf. Program literasi yang sistematis diterapkan untuk memastikan bahwa mereka yang belum mendapatkan akses pendidikan dapat belajar dengan baik.
Strategi IMPRESIF: Roadshow dan Advokasi membantu BPMP mencapai daerah terpencil yang masih mengalami buta huruf dan kesulitan akses pendidikan. Dengan kolaborasi antara BPMP, pemerintah daerah, dan komunitas lokal, tantangan ini diatasi melalui program literasi dan penguatan pendidikan dasar yang menyeluruh.
- f. Tantangan: Ketimpangan Pendidikan Perkotaan dan Pedesaan
Manajemen Mutu: Manajemen mutu dalam pendidikan mengarahkan pengelolaan pendidikan yang merata di semua wilayah, memastikan bahwa standar kualitas diterapkan baik di perkotaan maupun pedesaan.
Strategi IMPRESIF: Komponen Pelibatan Sumber Daya dan Elaborasi Tugas Bersama mendorong pemerintah daerah dan sekolah-sekolah di pedesaan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tantangan ketimpangan pendidikan. Program digitalisasi pendidikan melalui Platform Merdeka Mengajar dan Program Sekolah Penggerak juga mendukung peningkatan akses pendidikan berkualitas di daerah pedesaan.
- g. Tantangan: Keterbatasan Akses dan Infrastruktur Pendidikan di Pedesaan
Manajemen Mutu: Sistem manajemen mutu memastikan bahwa infrastruktur dan fasilitas pendidikan dievaluasi secara terus-menerus, dengan perbaikan yang berkelanjutan untuk memastikan akses pendidikan yang layak bagi semua siswa, terutama di daerah-daerah terpencil.
Strategi IMPRESIF: Melalui Roadshow dan Intervensi Kebijakan, BPMP Sumatera Utara secara aktif mendekati daerah-daerah dengan infrastruktur terbatas dan memfasilitasi perbaikan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah. Program Penguatan Tata Kelola juga mendorong perbaikan infrastruktur melalui alokasi anggaran yang tepat dan penggunaan sumber daya yang efisien.

SIMPULAN

Penerapan strategi IMPRESIF dan manajemen mutu oleh BPMP Sumatera Utara telah memberikan pendekatan yang efektif dalam mengatasi tantangan penjaminan mutu pendidikan. Dengan fokus pada internalisasi kebijakan, advokasi, serta pelibatan sumber daya, strategi ini mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui program-program seperti Sekolah Penggerak, Kurikulum Merdeka, dan digitalisasi. Manajemen mutu yang berkelanjutan memastikan perbaikan yang terus-menerus dan pemerataan kualitas pendidikan, meskipun diperlukan peningkatan lebih lanjut untuk mengatasi ketimpangan dan keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbangi, Dakir, & Umiarso. (2018). *Manajemen Mutu Pendidikan*. Depok: Prenadamedia Group.
- Arwildayanto, A., Suking, A., & Sumar, W. T. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoritis, Eksploratif, dan Aplikatif*. Bandung: Cendekia Press.
- Aslami, N., & Alfariysi, M. F. (2023). Konsep Manajemen Mutu Pendidikan. *Journal on Education*, 6(1), 7562-7573. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.4065>
- Baharun, H., & Zamroni. (2017). *Manajemen Mutu Pendidikan: Ikhtiar dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah melalui Pendekatan Balanced Scorecard*. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. (2023, July 4). *Strategi Advokasi Konsultatif dan Asimetris Kebijakan Merdeka Belajar Melalui Pendekatan IMPRESIF*. BPMP Sumut. <https://bpmpprovsumut.kemdikbud.go.id/strategi-advokasi-konsultatif-dan-asimetris-kebijakan-merdeka-belajar-melalui-pendekatan-impresif/>
- Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. (2024). *Laporan Kinerja BPMP Sumatera Utara Tahun 2023*. <https://bpmpprovsumut.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2024/04/LAKIN-BPMP-SUMUT-TAHUN-2023-310124-1.pdf>
- Barnawi, & Arifin, M. (2017). *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

- BPMP Provinsi Sumatera Utara. (2023, September 22). BPMP Sumut Gelar Rapat Koordinasi Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal. <https://bpmpprovsumut.kemdikbud.go.id/bpmp-sumut-gelar-rapat-koordinasi-bidang-paud-dan-pendidikan-non-formal/>
- BPMP Provinsi Sumatera Utara. (2024). Tugas Pokok dan Fungsi. <https://bpmpprovsumut.kemdikbud.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>
- Elwijaya, F., Mairina, V., & Gistituati, N. (2021). Konsep dasar kebijakan pendidikan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 67-71. <https://doi.org/10.29210/3003817000>
- Hadi, A. (2018). Konsepsi Manajemen Mutu dalam Pendidikan. *Jurnal Idaarah*, 2(2), 269-279. <https://doi.org/10.24252/idaarah.v2i2.5260>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2005). Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- LPMP Sumatera Utara. (2020). Rencana Strategis LPMP Sumatera Utara 2020-2024. Diambil dari <https://bpmpprovsumut.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/12/RENSTRA-LPMP-SUMUT-2020-2024.pdf>
- Lubis, N. (2023, Agustus 18). BPMP Sumut Gunakan Strategi IMPRESIF Tingkatkan Mutu Pendidikan. *Pewarta.co*. <https://pewarta.co/news/sumut/bpmp-sumut-gunakan-strategi-impresif-tingkatkan-mutu-pendidikan>
- Mundiri, A. (2016). Strategi lembaga pendidikan Islam dalam membangun branding image. *Pedagogik: Jurnal Pendidikan*, 3(2), 58-72. <https://doi.org/10.33650/pjp.v3i2.125>
- Ristianah, N., & Ma'sum, T. (2022). Konsep Manajemen Mutu Pendidikan. *TABYIN: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM*, 4(01), 45-55. <https://doi.org/10.52166/tabyin.v4i01.169>
- Sebayang, J. S. (2019, November 16). Tantangan pendidikan di Sumatera Utara. *Utama News*. <https://www.utamanews.com/opini/Tantangan-Pendidikan-di-Sumatera-Utara>
- Susanto, A. (2018). Manajemen Peningkatan Kinerja Guru: Konsep, Strategi, dan Implementasi. Depok: Kencana.
- Suwandi, M. F., & Permatasari, C. L. (2021). Strategi peningkatan kompetensi guru dalam proses belajar mengajar. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 18(1). <https://doi.org/10.21831/jep.v18i1.38688>
- Thoyyib, M. 2012. Manajemen Mutu Pendidikan Islam Kontemporer. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.
- Wijaya, C., & Rifa'i, M. (2016). Dasar-Dasar Manajemen: Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi secara Efektif dan Efisien. Medan: Perdana Publishing.